




KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2020.

Penyusunan LKjIP Bappeda dan Litbang Tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang atas pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, Rencana Kerja (RENJA) 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah disusun. LKjIP Tahun 2020 juga merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan RENSTRA, RENJA 2020, Perjanjian Kinerja 2020 dan juga dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Semoga penyusunan LKjIP Bappeda dan Litbang ini dapat mencerminkan kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2020.

Malinau, 20 Januari 2021
Kepala Bappeda dan Litbang



Dr. Kristian, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19661123 199503 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda dan Litbang ini memberikan gambaran tentang kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada tahun 2020. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Bappeda dan Litbang senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta catatan-catatan penting dalam pencapaian sasaran. Selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020 Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau mengelola anggaran sebesar **Rp 12.158.869.198,78** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp 9.064.737.527,80** dan Belanja Langsung sebesar **Rp 3.094.131.670,98**. Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan belanja langsung digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Realisasi keuangan belanja langsung sebesar **83,65 %** dengan penyerapan dana sebesar Rp **2.588.346.293,00**. Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Bappeda dan Litbang melaksanakan 8 program dan 23 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2020 adalah realisasi fisik sebesar **83,65 %**



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dapat dikategorikan **Berhasil**. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja berada di interval Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan perangkat regulasi dari pemerintah Pusat yang belum lengkap.

LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Malinau, 20 Januari 2021
Kepala Bappeda dan Litbang

Dr. Kristian, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19661123 199503 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Lampiran	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan Laporan	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang	6
D. Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021	10
2.2 Tujuan dan Sasaran	11
2.3 Strategi dan Kebijakan	14
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.5 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Analisis Capaian Kinerja	23
C. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN

Bagan Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau	
Tabel 2.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda dan Litbang
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau
Tabel 3.1.1	Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Tabel 3.1.2	Program dalam RKPD 2020 yang selaras dengan program RPJMD 2021-2026
Tabel 3.1.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
Tabel 3.1.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Panjang Menengah
Tabel 3.1.5	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020
Tabel 3.2.1	Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Tabel 3.2.2	Persentase Sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD
Tabel 3.2.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
Tabel 3.2.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Panjang Menengah
Tabel 3.2.5	Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD 2020
Tabel 3.2.6	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
Tabel 3.2.7	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Panjang Menengah
Tabel 3.2.8	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020
Tabel 3.3.1	Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Tabel 3.3.2	Capaian Kinerja SKPD 2020
Tabel 3.3.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
Tabel 3.3.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Panjang Menengah
Tabel 3.3.5	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020
Dokumentasi Kegiatan Tahun 2020	



BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Bappeda dan Litbang
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Bappeda dan Litbang
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Bappeda dan Litbang
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Bappeda dan Litbang
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Bappeda dan Litbang

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja OPD

B.1 Kedudukan :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 Tugas :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Pembiayaan,



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

B.3 Fungsi :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Subbagian Penyusunan Program
- c. Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 1. Subbidang Pengelolaan Data Spasial



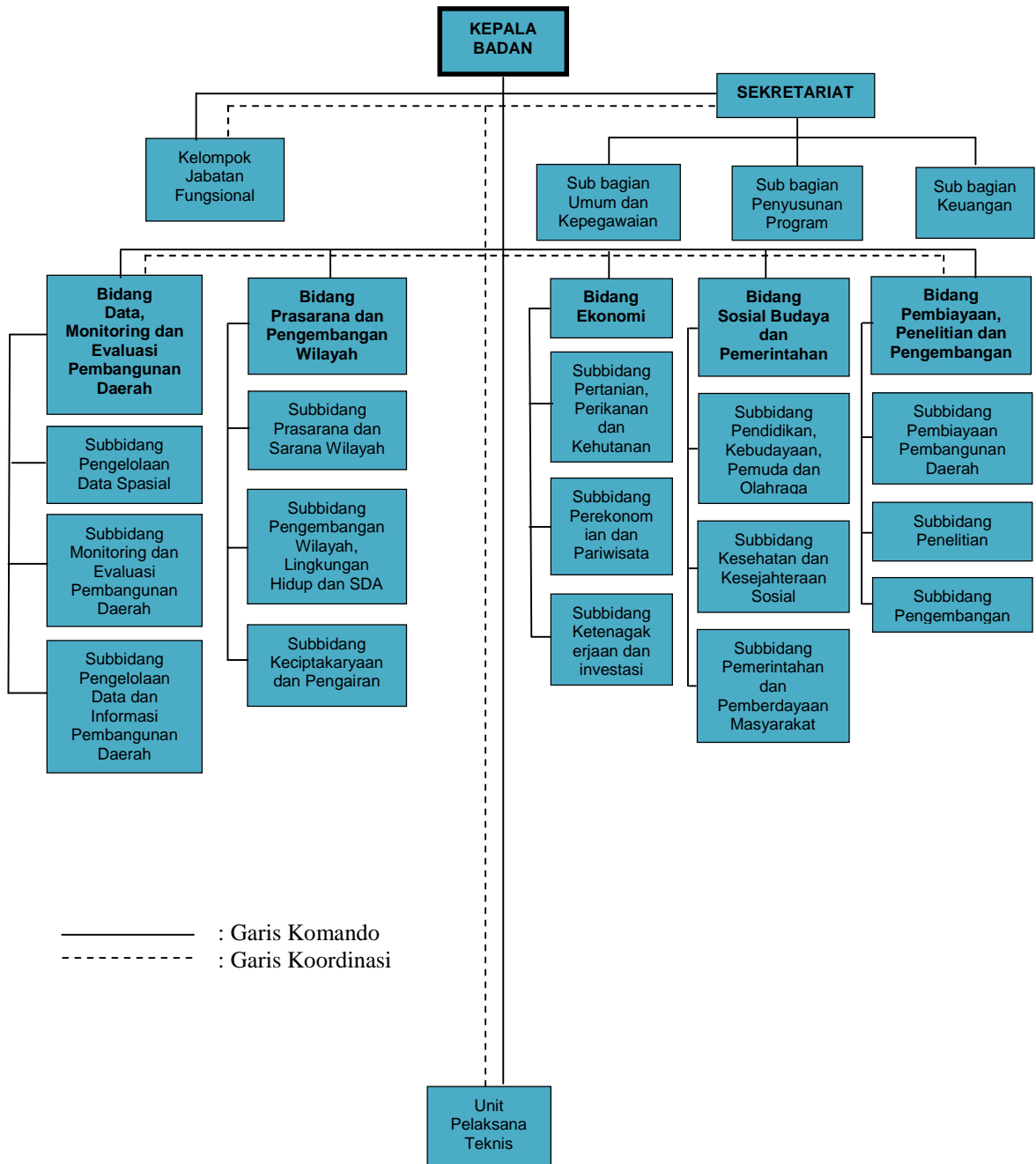
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

2. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
3. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- d. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 1. Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah
 2. Subbidang Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
 3. Subbidang Keciptakarya dan Pengairan
- e. Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 1. Subbidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 2. Subbidang Perekonomian dan Pariwisata
 3. Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi
- f. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas :
 1. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
 2. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
 3. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- g. Bidang Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas :
 1. Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah
 2. Subbidang Penelitian
 3. Subbidang Pengembangan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN MALINAU**





C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana Organisasi Bappeda dan Litbang menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda dan Litbang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (*shortcutting*);
3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
4. Kompetensi SDM perencana belum optimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
7. Belum lengkapnya *Standar Operating Procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
8. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana.
9. Belum optimalnya fungsi penelitian dalam menghasilkan kajian-kajian strategis;
10. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan Bappeda dan Litbang;



11. Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan;
12. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
13. Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh OPD;
14. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan *output* dan *outcome* yang dihasilkan;
15. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk isu daerah. Bappeda dan Litbang sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda dan Litbang, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda dan Litbang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - Kepatuhan OPD untuk memedomani dokumen perencanaan masih rendah
 - Kesadaran OPD terhadap dokumen perencanaan masih rendah



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur perencana di OPD
 - Kurang memadainya data-data pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan
2. Belum optimalnya pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu;
- Belum optimalnya sistem informasi perencanaan yang ada
 - Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran
 - Aplikasi yang dibangun belum terintegrasi antara satu dengan yang lainnya
3. Belum optimalnya pencapaian hasil evaluasi pembangunan daerah;
- Hasil evaluasi kinerja belum dijadikan bahan pertimbangan kebijakan perencanaan berikutnya
 - Monitoring evaluasi yang dilakukan belum maksimal (sebatas laporan realisasi fisik dan keuangan)
 - OPD belum memahami secara utuh anggaran berbasis kinerja
 - Belum digunakannya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar penyusunan kebijakan



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN”**, berbasis pada posisi dan peran Bappeda dan Litbang dalam mendukung pencapaian **Misi Kedua** yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2016-2021, sehingga misi-misi yang mejadi basis tersebut adalah memantapkan implementasi 3 (tiga) program unggulan dan 13 (tiga belas) program utama daerah.

Berdasarkan tujuan dan misi RPJMD di atas, peran Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yang strategis terdiskripsi secara jelas sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda dan Litbang. Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan dijabarkan dalam cara pandang dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang partisipatif, akomodatif, efektif dan efisien. Dengan visi ini diharapkan kualitas pengelolaan pembangunan di Kabupaten Malinau terutama ditinjau dari aspek perencanaan lebih meningkat dan menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya.

Adapun langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dengan menentukan misi yaitu :

Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat



dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi (Misi 2).

Tabel 2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)				
NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2 : Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi			
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sudah ada koordinasi yang baik di tingkat desa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

Litbang Kabupaten Malinau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung pada tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang, serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya, selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda dan Litbang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bappeda dan Litbang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	63,64%	90,91%	72,73%	63,64%	54,55%
			<i>Persentase Program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD</i>					
		Meningkatnya konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD					
			<i>Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD</i>					
			Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD					
			<i>Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD</i>					
Meningkatnya pencapaian hasil pembangunan	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD							
	<i>Persentase capaian target kinerja SKPD</i>							

Sumber : Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Arah kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau

Visi	Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun		
Misi 2	Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Mengembangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Forum Perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	Harmonisasi hubungan kelembagaan antara pemerintah desa, Badan Musyawarah Desa, LPMD, Tokoh Adat, LP3MD dan lembaga kemasyarakatan lainnya

Sumber : Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Bappeda mengampu urusan perencanaan pembangunan daerah. Berdasar urusan dan program yang diampu, Bappeda



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

dan Litbang mendukung pencapaian 1 (Satu) misi Kabupaten Malinau yang tercantum pada Perubahan RPJMD yaitu :

Misi 2 : Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggung jawaban, dan evaluasi.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Bappeda sebanyak 3 (tiga) indikator.



Tabel 2.4

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG
 KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
SASARAN RPJMD	SASARAN RENSTRA				
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah program dalam RKPD yang selaras}}{\text{Jumlah program RPJMD}} \times 100$	Bappeda dan Litbang	Bappeda dan Litbang
	Meningkatnya konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah	Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD	$\frac{\text{Jumlah sasaran RPJMD yang selaras}}{\text{Jumlah sasaran RKPD}} \times 100$	Bappeda dan Litbang	Bappeda dan Litbang
		Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD	$\frac{\text{Jumlah program dan kegiatan RKPD}}{\text{Jumlah program dan kegiatan APBD}} \times 100$	Bappeda dan Litbang	Bappeda dan Litbang
	Meningkatnya pencapaian hasil pembangunan	Persentase capaian target kinerja SKPD	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memperoleh nilai sangat tinggi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$	Bappeda dan Litbang	Bappeda dan Litbang

Sumber Data :Sungram Bappeda dan Litbang Kab. Malinau



2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2020 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020 mengacu pada Renstra Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2020 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada tahun 2020, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	100%
2	Meningkatnya konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah	Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD	100%
		Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomondir program dan kegiatan APBD	
3	Meningkatnya pencapaian hasil pembangunan	Persentase capaian target kinerja SKPD	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 780.448.357	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 175.000.000	APBD
3	Pengembangan Data/Informasi	Rp. 187.697.459	APBD
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.101.291.461	APBD
5	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 142.077.246	APBD
6	Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp. 396.563.060	APBD
7	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp. 175.564.468	APBD
8	Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Rp. 135.489.619	APBD
	JUMLAH	Rp. 3.094.131.670	APBD



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Didalam bab ini akan dibahas mengenai Akuntabilitas Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yaitu kriteria ukuran keberhasilan kinerja, realisasi sasaran strategis tahun 2020, pengukuran kinerja tahun 2020, analisis keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja, hambatan serta langkah-langkah antisipatif untuk tercapainya target kinerja organisasi. Bab ini juga memuat target dan realisasi kinerja keuangan tahun 2020.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian kinerja pada Bappeda dan Litbang Malinau berpedoman pada Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang 2020. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Karakteristik indikator kinerja Bappeda dan Litbang bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

- a. Capaian kinerja > 95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
- b. Capaian kinerja > 80% sampai dengan 95% = Berhasil;
- c. Capaian kinerja > 50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil;
- d. Capaian kinerja < 50% = Sangat Rendah

Hingga akhir tahun 2020, Bappeda dan Litbang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

Capaian Kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	100	73,44	73,44
2	Meningkatnya konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah	Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD	100	287,5	287,5
		Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD	100	87,91	87,91
3	Meningkatnya pencapaian hasil pembangunan	Persentase capaian target kinerja SKPD	100	73,33	73,33

Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang tahun 2020 sebagai berikut, yaitu : indikator pertama yaitu **Persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD** menunjukkan capaian **73,44 %**, indikator kedua yaitu **Persentase sasaran RPJMD yang selaras**



dengan sasaran RKPD menunjukkan capaian **287,5 %** dan **Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD** menunjukkan capaian **87,91 %** dan indikator ketiga yaitu **Persentase capaian target kinerja SKPD** menunjukkan capaian **73,33 %**.

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan cara semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Penerapan rumus digunakan untuk menghitung persentase capaian pada seluruh indikator.

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh *stakeholder* dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk target kinerja Perangkat Daerah yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100% masih diperlukan upaya pencapaian kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Dari 3 (tiga) indikator sasaran menunjukkan capaian berhasil dan sangat berhasil.



B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

Tabel 3.1.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	%	100	100	93,33	93,33	100	73,44	73,44

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Dalam pengambilan kebijakan, diperlukan data-data perencanaan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan agar kebijakan yang diambil sesuai untuk dapat menjawab permasalahan utama Kabupaten. Bappeda dan Litbang mempunyai tanggung jawab dalam penyediaan data-data perencanaan yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Data-data/dokumen perencanaan yang menjadi target capaian dan harus ada di Bappeda dan Litbang adalah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3. Rencana Strategis (Renstra)
4. Rencana Kerja (Renja)

Pada umumnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Malinau mengalami



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

peningkatan. Setiap OPD menyusun dokumen perencanaan setiap tahun yaitu Renstra dan Renja, dokumen ini merupakan acuan bagi OPD untuk menyusun program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan, baik itu dalam bentuk usulan lintas sektoral bidang ekonomi, bidang prasarana dan pengembangan wilayah, bidang sosial, budaya dan pemerintahan. Namun demikian dalam proses penyusunan program, kegiatan dan anggaran OPD di Kabupaten Malinau harus sesuai (selaras) dengan dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Malinau, maka dilakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan Renstra/Renja PD yang disusun, agar program dan kegiatan dalam Renstra/Renja PD yang selaras dengan RPJMD/RKPD mencapai persentase yang tinggi yaitu 100%.

Sasaran strategis pertama, dengan indikator kinerja yaitu **Persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD**. Untuk mendukung indikator tersebut diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman untuk perangkat daerah untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun dokumen wajib yang disusun pada kegiatan di Bappeda dan Litbang pada tahun 2020 adalah :

1. Dokumen Musrenbang Kabupaten Malinau Tahun 2020
2. Dokumen KUA, PPAS-Perubahan dan KUA, PPAS
3. Dokumen RKPD
4. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD 2021 s/d 2026
5. Buku Profile Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020
6. Buku LKPJ Bupati Malinau Tahun 2020

Untuk mencapai target capaian kinerja indikator diperoleh dengan cara membandingkan jumlah program dalam RKPD dengan jumlah program dalam RPJMD, berikut adalah data



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

program dari masing-masing dokumen yang dijadikan sebagai rumus untuk menghitung persentase realisasi indikator.

**Tabel 3.1.2
Program dalam RKPD 2020 yang selaras dengan program RPJMD 2021-2026**

PROGRAM RKPD 1	PROGRAM RPJMD 2
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
	Program Peningkatan Profesional SDM
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (BLUD)	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit (BLUD)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (RASDA)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Bantuan dan Jaminan Sosial	Program Bantuan dan Jaminan Sosial
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Program Pengembangan Perumahan
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Program perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Program perencanaan Pembangunan sosial dan budaya
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program pembangunan jalan dan jembatan
	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	Program Penyediaan dan Pengelolaan air baku
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Kominfo	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Kominfo
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
	Program Pembinaan dan Pengawasan BUMD
Program Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Bidang Ekonomi	Program Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Program perencanaan pembangunan ekonomi
Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar
Program Pengendalian dan Pemeliharaan Pasar	Program Pengendalian dan Pemeliharaan Pasar
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Pasar)
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Program peningkatan produksi hasil peternakan
	Program Peningkatan infrastruktur Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Pertanian dan sarana produksi Pertanian
	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian
	Program pengembangan budidaya perikanan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten/Kota)	Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten/Kota)
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan	Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
	Program Pengembangan sentra -sentra industri potensial
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Program Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Program Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial
	Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

	lingkungan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program pengembangan wawasan Kebangsaan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Program Pembangunan Sanitasi Pemukiman
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Program peningkatan jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governance, Clean Government, dan Pelayanan Publik	Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governance, Clean Government, Dan Pelayanan Publik
	Program Penunjang Pengawasan
Program Pengawasan dalam Rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan	Program Pengawasan dalam Rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Program pendidikan politik masyarakat
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Program Evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah
Program Keserasian Kebijakan, Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Program Keserasian Kebijakan, Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan
	Program Keserasian Kebijakan, Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Program Peningkatan Revitalisasi Gerakan Pramuka	Program Peningkatan Revitalisasi Gerakan Pramuka
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program pengelolaan Keragaman Budaya
Program Pengembangan Nilai Budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

	perencanaan pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program perencanaan pembangunan daerah
Program Koordinasi Pembangunan di Wilayah Kecamatan	Program koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Program Fasilitasi Informasi Kedewanan	Program Fasilitasi Informasi Kedewanan
94 Program RKPD	128 Program RPJMD

Sumber Data : Dokumen RPJMD Perubahan 2021-2026 dan Dokumen RKPD Perubahan 2020

Dari tabel diperoleh jumlah program RKPD sebanyak 94 program yang selaras dengan program RPJMD sebanyak 128, maka penghitungan yang digunakan untuk mengetahui **“Persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD”** sebagai berikut :

% Realisasi =	$\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD yang selaras}}{\text{Jumlah Program RPJMD}}$	×100%
% Realisasi =	$\frac{94}{128}$	×100%
% Realisasi =	73,44	

Persentase realisasi sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD diperoleh 87,91% maka dengan target indikator sasaran kedua diperoleh hasil sebagai berikut :

% capaian kinerja =	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	×100
% capaian kinerja =	$\frac{73,44}{100}$	×100
% capaian kinerja =	73,44	

Persentase tingkat capaian kinerja pada indikator sasaran kedua yaitu 73,44% dengan kategori **Cukup Berhasil**. Adapun data dukung untuk pencapaian indikator sasaran ketiga ini adalah dokumen RKPD Tahun 2020 dan dokumen RPJMD 2021-2026.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan realisasi kinerja tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2020 Vs Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Capaian Target Kinerja SKPD	%	73,44	70,00	90,00	93,33	95,32	122,55	127,09

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Panjang Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Renstra Tahun			Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Capaian Target Kinerja SKPD	%	73,44	100	100	100	73,44	73,44	73,44

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor pendukung capaian kinerja adalah :

1. Melakukan evaluasi dan verifikasi penyusunan Renja PD serta melakukan pendampingan penyusunan program dan kegiatan dalam Renja PD sehingga program dan kegiatan dalam Renja yang selaras dengan RKPD mencapai persentase yang sangat tinggi yaitu 100 %



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

2. Pemilihan yang tepat terhadap program dan kegiatan yang akan mencapai sasaran tersebut, hal ini memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran yang diharapkan
3. Koordinasi yang baik antara dengan seluruh SKPD di Kabupaten Malinau
4. Komitmen bidang-bidang perencana dalam rangka melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD

Faktor penghambat Capaian Kinerja :

1. Terjadinya Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya perubahan pergeseran dan rasionalisasi anggaran pelaksanaan kegiatan sehingga ada keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan akibat adanya penyesuaian anggaran TA. 2020
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Beppeda dan Litbang yang seharusnya dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara, tidak dapat terlaksana karena kondisi pandemi Covid-19 Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sebagai pihak penyelenggara kegiatan tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatan karena adanya larangan berkumpul dalam jumlah banyak
3. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD Pengelola Kegiatan DAK, Bankeu, Dekon dan TP tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan karena keterbatasan pelaksanaan kegiatan yang bersifat koordinasi dan konsultasi terutama untuk pengelolaan dana DAK, Bankeu, Dekon dan TP oleh karena adanya pandemi Covid-19

Solusi/rekomendasi perbaikan kinerja :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Meningkatkan dan mempertahankan koordinasi dengan para pihak dalam rangka menyamakan persepsi untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan
2. Menjalin koordinasi yang baik dengan pihak provinsi Kalimantan Utara sebagai leading sektor pelaksana kegiatan Rakor Bappeda Se-Kalimantan Utara
3. Menganggarkan kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena pembatasan sosial berskala besar menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui virtual zoom

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	73,44	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80,06
			2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
3. Program Pengembangan Data/Informasi				
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
1. Penyediaan Alat Tulis Kantor				
2. Penyediaan Makanan dan Minuman				
3. Rapat Koordinasi, Konsultasi dalam dan Luar Daerah				



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Dengan Penganggaran Pembangunan Daerah

Tabel 3.2.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD	%	100	100	287,5	287,5	100	287,5	287,5
Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD	%	100	100	90,00	90,00	100	87,91	87,91

Dalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan pesatnya pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta prasarana dan pengembangan wilayah di daerah perbatasan, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai ketinggian Kabupaten/Kota. Data dan indikator yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tersebut juga mempengaruhi capaian target kinerja organisasi,



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

dengan kata lain bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian yang semakin baik.

Pada bagian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah serta capaian kinerja Bappeda dan Litbang. Karena perencanaan dan penganggaran di SKPD sangat berkontribusi terhadap suksesnya perencanaan dan penganggaran di daerah.

Sasaran Strategis kedua, dengan indikator kinerja yaitu **Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD** dan **Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD** untuk mencapai tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Bappeda dan Litbang dilakukan dengan meningkatkan sistem pengendalian melalui asistensi dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan OPD oleh bidang-bidang perencana Bappeda dan Litbang. Adapun dokumen perencanaan yang diasistensi dan verifikasi yaitu dokumen Renstra, Renja dan RKA OPD.

Untuk mencapai target capaian kinerja indikator pertama diperoleh melalui jumlah sasaran yang ada pada dokumen RPJMD dan sasaran dokumen RKPD, berikut adalah data sasaran dari masing-masing dokumen yang dijadikan sebagai rumus untuk menghitung persentase realisasi indikator pertama.

Tabel 3.2.2
Persentase Sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD

Sasaran RPJMD	Sasaran RKPD
Meningkatnya mutu pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata
Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	
Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan Perkotaan
Meningkatnya Partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	
Meningkatnya infrastruktur daerah baik di perkotaan maupun perdesaan	Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas daerah baik diperkotaan maupun perdesaan
Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan Perkotaan	Meningkatnya Daya Saing Pertanian, Industri Kecil, UMKM dan Koperasi
Meningkatnya Pemerataan pertumbuhan ekonomi	
Terbukanya lapangan pekerjaan	



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

Mengembangkan produk unggulan	
Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	
Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan Perkotaan
Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas daerah baik diperkotaan maupun perdesaan
Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah
Meningkatkan kualitas air dan udara	Meningkatkan kualitas air dan udara
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah
Meningkatnya Kesetaraan gender	
Meningkatnya Pemberdayaan gender	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dan wanita dalam pembangunan
Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Optimalisasi pengembangan potensi pariwisata budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	
Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah

Sumber Data : Dokumen RPJMD 2016—2021 dan Dokumen RKPD 2020 Bappeda dan Litbang

Dari tabel diperoleh jumlah sasaran RPJMD sebanyak 23 sasaran dan sasaran RKPD sebanyak 8 sasaran, maka penghitungan yang digunakan untuk mengetahui “**Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD**” sebagai berikut :

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah sasaran RPJMD yang selaras}}{\text{Jumlah sasaran RKPD}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{23}{8} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = 287,5$$

Persentase realisasi sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD diperoleh 287,5% maka dengan target indikator sasaran kedua diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{287,5}{100} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = 287,5$$

Persentase tingkat capaian kinerja pada indikator sasaran pertama yaitu 287,5% dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun data dukung untuk pencapaian indikator sasaran pertama ini adalah data RPJMD 2016-2021 dan RKPD 2020.



Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan realisasi kinerja tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2020 Vs Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Capaian Target Kinerja SKPD	%	287,5	0	0	287,5	0	0	100,00

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Panjang Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Renstra Tahun			Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Capaian Target Kinerja SKPD	%	287,5	100	100	100	287,5	287,5	287,5

Untuk mencapai target capaian kinerja indikator sasaran kedua diperoleh melalui data jumlah program dan kegiatan RKPD dan jumlah program dan kegiatan APBD, berikut adalah data sasaran dari masing-masing dokumen yang dijadikan sebagai rumus untuk menghitung persentase realisasi indikator sasaran kedua.



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

**Tabel 3.2.5
Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD 2020**

No	Nama Perangkat Daerah	Program RKPd	Kegiatan RKPd	Nama Perangkat Daerah	Program APBD	Kegiatan APBD
1	2	3	4		5	6
1	Dinas Pendidikan	7	67	Dinas Pendidikan	7	210
2	Dinas Kesehatan	19	88	Dinas Kesehatan	18	122
3	RSUD	2	3	RSUD	2	3
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	16	61	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	17	71
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5	23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5	26
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	7
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	7	18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	8	18
9	Dinas Ketahanan Pangan	3	14	Dinas Ketahanan Pangan	3	12
10	Dinas Lingkungan Hidup	6	18	Dinas Lingkungan Hidup	6	20
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2	6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2	6
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	29
13	Dinas Perhubungan	6	25	Dinas Perhubungan	7	20
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	24
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	8	22	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	12
16				Dinas Tenaga Kerja	4	8
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	5	12	Dinas Pemuda dan Olahraga	6	13
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6	34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7	31
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	11
20	Dinas Perikanan	5	11	Dinas Perikanan	4	9
21	Dinas Pertanian	9	23	Dinas Pertanian	9	21
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6	20
23	Bagian Pengelolaan Perbatasan Daerah	3	6	Bagian Pengelolaan Perbatasan Daerah	3	6
24	Bagian Pembangunan	3	11	Sekretariat Kabupaten	17	96
25	Bagian Ekonomi	2	8			
26	Bagian Humas dan Protokol	4	8			
27	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3	8			
28	Bagian Umum	3	16			
29	Bagian Hukum	4	8			
30	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3	8			
31	Bagian Organisasi	4	15			
32	Bagian Perlengkapan	2	7			
33	Bagian Tata	4	8			



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

Pemerintahan						
34	Sekretariat DPRD	5	33	Sekretariat DPRD	5	31
35	Sekretariat Korpri	2	8	Sekretariat Korpri	3	8
36	Kecamatan Malinau Kota	3	13	Kecamatan Malinau Kota	3	12
37	Kecamatan Malinau Utara	2	8	Kecamatan Malinau Utara	4	9
38	Kecamatan Malinau Barat	3	9	Kecamatan Malinau Barat	4	9
39	Kecamatan Mentarang	2	10	Kecamatan Mentarang	3	10
40	Kecamatan Mentarang Hulu	3	9	Kecamatan Mentarang Hulu	3	9
41	Kecamatan Pujungan	2	5	Kecamatan Pujungan	2	5
42	Kecamatan Kayan Hilir	2	8	Kecamatan Kayan Hilir	2	8
43	Kecamatan Kayan Hulu	2	6	Kecamatan Kayan Hulu	2	6
44	Kecamatan Sungai Boh	3	5	Kecamatan Sungai Boh	3	5
45	Kecamatan Bahau Hulu	2	6	Kecamatan Bahau Hulu	2	6
46	Kecamatan Kayan Selatan	2	7	Kecamatan Kayan Selatan	3	14
47	Kecamatan Sungai Tubu	2	6	Kecamatan Sungai Tubu	2	6
48	Kecamatan Malinau Selatan	3	9	Kecamatan Malinau Selatan	3	9
49	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	3	7	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	3	7
50	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	3	9	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	4	9
51	Perwakilan Kecamatan Long Sule	2	2			
52	Kantor Persiapan Kecamatan Malinau Utara Timur	2	4			
53	Inspektorat	3	30	Inspektorat	3	31
54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	8	23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	8	23
55	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	70	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	71
56	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7	21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7	21
TOTAL		246	946		240	1116

Sumber Data : Dokumen RKPd 2020 dan Data Evaluasi Renja PD 2020

Dari tabel diperoleh jumlah program RKPd sebanyak 246 dan jumlah kegiatan RKPd sebanyak 946, sedangkan program APBD sebanyak 240 dan kegiatan APBD sebanyak 1116, maka penghitungan yang digunakan untuk mengetahui “**Persentase program dan kegiatan RKPd yang diakomodir program dan kegiatan APBD**” sebagai berikut :

% Realisasi =	$\frac{\text{Jumlah Program dan kegiatan RKPd}}{\text{Jumlah Program dan Kegiatan APBD}} \times 100\%$
% Realisasi =	$\frac{(246+946)}{(240+1116)} \times 100\%$
% Realisasi =	87,91



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

Persentase realisasi sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD diperoleh 87,91% maka dengan target indikator sasaran kedua diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{87,91}{100} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = 87,91$$

Persentase tingkat capaian kinerja pada indikator sasaran kedua yaitu 87,91% dengan kategori **Berhasil**. Adapun data dukung untuk pencapaian indikator sasaran ketiga ini adalah dokumen RKPD Tahun 2020 dan data Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan realisasi kinerja tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2020 Vs Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Capaian Target Kinerja SKPD	%	87,91	70,00	80,00	90,00	79,63	91,01	102,38

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 3.2.7
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Panjang Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Renstra Tahun			Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Capaian Target Kinerja SKPD	%	87,91	100	100	100	87,91	87,91	87,91

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor pendukung capaian kinerja adalah :

1. Berusaha/diupayakan mengintegrasikan kedalam proses penganggaran melalui beberapa tahapan, mulai dari kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran penyusunan rencana kerja anggaran SKPD dan penyusunan lampiran-lampiran perda APBD
2. Melakukan pelaksanaan dan pendampingan dalam proses identifikasi sasaran dan kegiatan pada tahap penyusunan renja Perangkat Daerah pada masing-masing bidang koordinasinya di Bappeda dan Litbang
3. Komitmen keterlibatan partisipasi Perangkat Daerah dalam rangka memberikan informasi terkait capaian kinerja setiap tahunnya

Faktor penghambat capaian kinerja :

1. Kegiatan Penilaian Lomba Stand Irau tidak dapat dilaksanakan dan anggaran digeser untuk dana Penanganan Covid 19, terjadinya Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya perubahan pergeseran dan rasionalisasi anggaran pelaksanaan kegiatan sehingga ada keterlambatan dan tidak dapat terlaksananya kegiatan pada Bappeda dan Litbang, koordinasi dan konsultasi tidak



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

dapat sepenuhnya dilaksanakan disebabkan dibatasainya pelaksanaan pertemuan

Solusi/rekomendasi perbaikan kinerja :

1. Dalam rangka meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau direkomendasikan untuk meningkatkan intensitas informasi dan komunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas SDM/pejabat perencana dalam membuat setiap kegiatan yang diajukan, meningkatkan pengetahuan aparatur yang terkait dalam penyusunan anggaran serta meningkatkan komitmen dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

**Tabel 3.2.8
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah	Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD	287,5	1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 3. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	93,19
	Persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD	87,91	1. Pendampingan Kegiatan HoB (Heart of Borneo) 2. Penilaian lomba stand pameran dalam rangka IRAU Kabupaten Malinau 2020 3. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi bidang ekonomi 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 5. Koordinasi, Konsultasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 6. Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S) Kabupaten Malinau 7. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi bidang PPW	

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja didukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2020 capaian indikator kinerja pertama persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD 287,5%, capaian indikator kedua persentase program dan kegiatan RKPD yang diakomodir program dan kegiatan APBD mencapai angka 87,91%.

Untuk mendukung capaian indikator pertama dan kedua dilaksanakan dengan 3 (tiga) program yaitu :

1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2. Perencanaan Sosial dan Budaya
3. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pagu anggaran dari 3 program diatas adalah **Rp 714.204.774** dan terealisasi sebesar **Rp 665.571.226** atau **93,19 %** sehingga terdapat efisiensi anggaran **6,81 %**



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya pencapaian hasil pembangunan

Tabel 3.3.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase capaian target kinerja SKPD	%	90,00	100,00	72,09	72,09	100,00	73,33	73,33

Kegiatan evaluasi dan pengendalian di dalam siklus perencanaan pembangunan sangatlah penting karena hasil dari evaluasi dan pengendalian dapat digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah memberikan panduan yang jelas mengenai instrumen apa yang digunakan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu dokumen Renja. Dengan implementasi yang tepat akan terasa manfaat yang bisa diambil bagi perbaikan dan peningkatan mutu dalam menyusun perencanaan pembangunan yang bermutu dan berkualitas.

Pengendalian dan evaluasi pada tahap ini adalah untuk memastikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun rencana dapat tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

memetakan permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil kinerja tahun sebelumnya dan prediksi keadaan tahun berjalan hingga dua tahun kedepan sehingga dapat diputuskan program dan kegiatan apa yang akan dipilih untuk dilaksanakan.

Capaian target **Sasaran 3**, Indikator Kinerja yaitu **Persentase capaian target kinerja SKPD**, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen pembangunan dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan yang ada baik itu kinerja OPD maupun anggarannya. Hasil capaian kinerja dan keuangan dokumen pembangunan dapat dilihat dari capaian kinerja dan keuangan OPD. Nilai kinerja perangkat daerah yang dievaluasi tahun anggaran 2020 periode triwulan IV adalah sebagai pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Capaian Kinerja SKPD 2020

No	Organisasi Perangkat Daerah / Program	Realisasi Capaian Kinerja	
		Persentase	Predikat Kinerja
1	Dinas Pendidikan	95,72	ST
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	83,81	T
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	83,33	T
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	114,78	ST
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	80,83	T
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	66,07	S
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	87,81	T
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	92,39	ST
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	93,89	ST
10	Dinas Tenaga Kerja	75,00	S
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	100,00	ST
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	97,38	ST
13	Dinas Perhubungan	99,22	ST
14	Dinas Ketahanan Pangan	100,00	ST
15	Dinas Pertanian	100,00	ST
16	Dinas Perikanan	87,50	T
17	Dinas Lingkungan Hidup	100,00	ST
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100,00	ST
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	99,78	ST
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	95,51	ST
21	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	94,68	ST
22	Sekretariat Daerah	88,64	T
23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	99,35	ST
24	Sekretariat DPRD	100,00	ST
25	Inspektorat	89,29	T
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00	ST
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	98,96	ST



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	100,00	ST
29	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	75,00	S
30	RSUD	99,49	ST
31	Kecamatan Malinau Kota	96,59	ST
32	Kecamatan Mentarang	100,00	ST
33	Kecamatan Malinau Utara	96,15	ST
34	Kecamatan Malinau Barat	100,00	ST
35	Kecamatan Kayan Hulu	88,22	T
36	Kecamatan Sungai Boh	100,00	ST
37	Kecamatan Bahau Hulu	100,00	ST
38	Kecamatan Malinau Selatan	93,75	ST
39	Kecamatan Mentarang Hulu	87,67	T
40	Kecamatan Pujungan	100,00	ST
41	Kecamatan Kayan Selatan	90,00	ST
42	Kecamatan Sungai Tubu	98,50	ST
43	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	98,33	ST
44	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	93,75	ST
45	Kecamatan Kayan Hilir	100,00	ST

Sumber Data : Bidang Data dan Informasi Bappeda dan Litbang 2020

Dengan target dari 45 OPD yang dievaluasi terhadap capaian kinerjanya terdapat 33 OPD yang mendapat predikat kinerja sangat tinggi (ST) sehingga dalam penghitungan “***persentase capaian target kinerja SKPD***” digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah OPD yang memperoleh nilai sangat tinggi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{33}{45} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = 73,33$$

Persentase realisasi evaluasi kinerja dari 33 OPD yang mencapai predikat kinerja sangat tinggi diperoleh 73,33%, maka dengan target indikator sasaran ketiga diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{73,33}{100} \times 100$$

$$\% \text{ capaian kinerja} = 73,33$$



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020*

Persentase tingkat capaian kinerja pada sasaran ketiga yaitu 73,33% dengan kategori **cukup berhasil**. Adapun data dukung untuk pencapaian sasaran ketiga ini adalah data evaluasi renja perangkat daerah triwulan IV tahun anggaran 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan realisasi kinerja tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2020 Vs Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Capaian Target Kinerja SKPD	%	73,33	0	0	72,09	0	0	98,31

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Panjang Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Renstra Tahun			Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Capaian Target Kinerja SKPD	%	73,33	0	0	100	0	0	73,33



a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor pendukung capaian kinerja adalah :

1. Kesesuaian antara Renstra dan Renja OPD
2. Penyusunan Anggaran Kas setiap triwulannya

Faktor penghambat capaian kinerja :

1. Masih sering terjadi keterlambatan proses pelaporan evaluasi renja Perangkat Daerah
2. Penetapan indikator program dan kegiatan yang masih belum sesuai
3. Tingkat kemampuan SDM perencana yang masih kurang
4. Refocussing anggaran dipertengahan tahun anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan yang tidak maksimal untuk dilaksanakan
5. Kegiatan yang sifatnya memerlukan banyak orang tidak bisa dilaksanakan
6. Pelaksanaan kegiatan kadang-kadang disesuaikan dengan kegiatan Kementerian

Solusi/rekomendasi perbaikan kinerja :

1. Perlu adanya refreshing dalam rangka peningkatan kualitas SDM perencana OPD yang melaporkan secara rutin kepada Bappeda dan Litbang tentang realisasi kegiatan melalui sosialisasi dan pelatihan
2. Setiap perangkat daerah diharapkan konsisten menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan beserta target satuan indikator kinerja
3. Untuk memudahkan evaluasi agar target satuan antara yang ada di Renstra dengan yang ada di Renja selaras
4. Aparatur di masing-masing perangkat daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

mobilisasi sumber daya terhadap kegiatan, baik internal maupun lintas perangkat daerah, bahkan dengan masyarakat dan dunia usaha

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pencapaian Hasil Pembangunan	Persentase Capaian Target Kinerja SKPD	73,33	Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	92,98
			1. Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah 2. Monitoring Evaluasi Dana DAK, Bantuan Keuangan, TP dan TEPR	

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja didukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2020 capaian indikator kinerja persentase capaian target kinerja SKPD mencapai angka 73,33%.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

Untuk mendukung capaian **Indikator Sasaran 3** dilaksanakan dengan 1 (satu) program yaitu :

1. Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Pagu anggaran dari program adalah **Rp 135.489.619** dan terealisasi sebesar **Rp 125.978.600** atau **92,98 %** sehingga terdapat efisiensi anggaran **7,02 %**



C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2020, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau mendapatkan anggaran sebesar Rp 12.158.869.198,78 dengan uraian belanja tidak langsung sebesar Rp 9.064.737.527,80 dan belanja langsung sebesar Rp 3.094.131.670,98 adapun realisasi belanja tidak langsung Rp 9.064.737.527,80 (100 %) dan belanja langsung Rp 2.588.346.293,00 (83,65 %)

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	9.064.737.527,80	9.064.737.527,80	100,00
2	Belanja Langsung	3.094.131.670,98	2.588.346.293,00	83,65
	Total	12.158.869.198,78	11.653.083.820,80	95,84

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:



Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Kinerja			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD	%	100	73,44	73,44	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.244.437.277	1.796.796.467	80,06
2	Meningkatnya konsistensi perencanaan dengan penganggaran pembangunan daerah	Persentase sasaran RPJMD yang selaras dengan sasaran RKPD	%	100	287,5	287,5	1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	714.204.774	665.571.226	91,19
		Persentase program dan kegiatan RKPD	%	100	87,91	87,91	2. Program Peningkatan Kapasitas			



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
 BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
 TAHUN ANGGARAN 2020

		yang diakomodir program dan kegiatan APBD					Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya			
3	Meningkatnya pencapaian hasil pembangunan	Persentase capaian target kinerja SKPD	%	100	73,33	73,33	1. Program Pengembangan Data/Informasi 2. Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	135.489.619	125.978.600	92,98



**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappeda dan Litbang
Untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2020**

Program/Kegiatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	780.448.357	460.137.592	73,15
Penyediaan Alat Tulis Kantor	125.979.725	94.319.000	74,87
Penyediaan Makanan dan Minuman	35.100.000	35.100.000	100,00
Rapat Koordinasi, Konsultasi dalam dan Luar Daerah	267.739.490	265.517.592	99,17
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD Pengelola Kegiatan DAK, Bankeu, Dekon dan TP	351.629.142	65.201.000	18,54
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	175.000.000	170.051.300	97,17
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	175.000.000	170.051.300	97,17
Perencanaan Pembangunan Daerah	1.101.291.461	1.010.317.175	83,12
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda)	273.521.957	266.732.800	97,52
Penyusunan KUPA,PPAS-Perubahan dan KUA,PPAS	130.283.516	128.483.516	98,62
Rapat koordinasi Bappeda dan Litbang se-Provinsi Kalimantan Utara	69.873.954	-	-
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	278.901.174	278.901.174	100,00
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	108.376.000	108.376.000	100,00
Pengembangan Jaringan Internet Data Spasial	87.028.860	74.698.200	85,83
Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD	153.306.000	153.125.486	99,88



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

2022 s/d 2027			
Pengembangan Data/Informasi	187.697.459	156.290.400	83,57
Penyusunan profile daerah Kab. Malinau	106.321.230	86.442.800	81,30
Penyusunan LKPJ Bupati Malinau Tahunan	81.376.230	69.847.600	85,83
Perencanaan Pembangunan Ekonomi	142.077.246	138.817.400	95,60
Pendampingan kegiatan HoB (Heart of Borneo)	36.113.307	32.983.000	91,33
Penilaian lomba stand pameran dalam rangka IRAU Kabupaten Malinau 2020	-	-	-
Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi bidang ekonomi	105.963.939	105.834.400	99,88
Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	396.563.060	387.129.326	98,28
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	101.706.724	100.989.000	99,29
Koordinasi, Konsultasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	197.811.263	189.209.500	95,65
Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S) Kabupaten Malinau	97.045.074	96.930.826	99,88
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	175.564.468	139.624.500	79,53
Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi bidang PPW	175.564.468	139.624.500	79,,53
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	135.489.619	125.978.600	94,94
Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah	37.077.992	36.808.600	99,27
Monitoring Evaluasi dana DAK, Bantuan Keuangan, TP dan Tepra	98s.411.628	89.170.000	90,61
TOTAL	3.094.131.671	2.588.346.293	83,65



BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada Tahun Anggaran 2020 secara umum telah menyelesaikan program dan kegiatan yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja sasaran sebesar **83,65 %** sehingga masuk dalam kategori **berhasil**.

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara umum dapat diatasi dengan dukungan potensi dan kemampuan organisasi yang ada. Keberhasilan yang telah dicapai tetap harus selalu dievaluasi karena seiring dengan berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi akan berbeda. Untuk itu sikap taktis dan responsif harus terus menerus dikembangkan. Dukungan masyarakat dan kerjasama instansi terkait juga harus bisa dimanfaatkan guna memacu kinerja instansi.

Kami berharap Laporan Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2020 dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, dan semoga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Malinau,
Kepala Bappeda dan Litbang


Dr. Kristian, M.Si
NIP. 19661123 199503 1 001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

**LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN
TAHUN 2020**

Kegiatan Musrenbang Kecamatan Tahun 2020 (Malinau Selatan)



Kegiatan Musrenbang Kecamatan Malinau Kota





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

Kegiatan Musrenbang Kecamatan Bahau Hulu



Kegiatan Musrenbang Kecamatan Pujungan





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

Kegiatan Musrenbang Kecamatan Malinau Barat



Kegiatan Musrenbang Kecamatan Malinau Utara





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

Kegiatan Konsultasi Publik



Virtual Meeting Musrenbang Kabupaten





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

Kegiatan Pengembangan SIPD





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

Kegiatan Virtual Meeting Konsultasi Publik



Kegiatan Money DAK





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2020

